

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah di Provinsi Jawa Timur

Laela Nurul Safa'ah¹, Evi Rahmawati², Arneta Ardelia Novem³,
Fatkhul Kholifatul Azizah⁴, Saiful Anwar^{5*}

¹²³⁴⁵Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, Salatiga-Indonesia

Koresponden: saifulanwarmieta@iainsalatiga.ac.id

Abstract

This study aims to test and analyze the effect of regional original income, profit sharing funds, and population of regional expenditure. This research was conducted in 6 districts/cities in East Java Province. The type of research is to use secondary data originating from the central PPID site in the form of a budget realization report. The data analysis technique used in this study uses a quantitative approach through EVIEWS 9 software with multiple linear regression analysis methods. The results of this study indicate that the regional revenue variables and the variable number of population has a positive and insignificant effect. Whereas for variables of fund sharing funds have a significant positive effect. From the research that has been done, it is hoped that the local government, especially the Regency/City of East Java Province can explore the potential as a source of Regional Original Revenue and maximize its budget for development and support community welfare.

Keywords: *Regional expenditure; Regional original income; profit sharing funds; population.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah. Penelitian ini dilakukan pada 6 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Jenis penelitiannya yaitu menggunakan data sekunder yang bersumber dari situs PPID Pusat berupa Laporan Realisasi Anggaran dari tahun 2016 hingga 2019. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui software EViews 9 dengan metode analisis regresi data panel. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Variabel Pendapatan Asli Daerah dan Variabel Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan tidak signifikan. Sedangkan untuk Variabel Dana Bagi Hasil berpengaruh positif signifikan. Dari penelitian yang telah dilakukan, diharapkan pemerintah daerah khususnya Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Timur dapat menggali potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah serta memaksimalkan anggarannya untuk pembangunan dan menunjang kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Belanja Daerah; Pendapatan Asli Daerah; Dana Bagi Hasil; Jumlah Penduduk.

Chronicle of Article: Received (04,07,2021); Revised (30,07,2021); and Published (20,08, 2021)

©2021 Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Sosial (EMBISS)

How to cite this article: safa'ah, L.N., Rahmawati, E., Novem, A.A., Azizah, F.K., & Anwar, S. (2021) 'Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah di Provinsi Jawa Timur', *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Sosial (EMBISS)*, 1(4), pp. 288-298. Available at: <https://embiss.com/index.php/embiss/article/view/37>

PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah pasal 4 Nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, patuh pada perundang-undangan yang berlaku, efektif, efisien, transparan, serta bertanggung jawab dengan asas keadilan dan kepatuhan. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya, disalurkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang mencerminkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan sosial. Berdasarkan UU Nomor 71 tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rancangan anggaran keuangan periode tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah itu sendiri berfungsi sebagai perencanaan. Maksud Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai perencanaan yaitu, Pemerintah Daerah mengajukan APBD sebagai pedoman dalam merencanakan kegiatan pada setiap tahunnya (Sari, 2017). UU nomor 33 tahun 2004, pengertian dari belanja daerah sendiri yaitu seluruh kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Belanja daerah sendiri memiliki peranan yang penting dalam mendanai urusan pemerintah yang menjadi kewenangan setiap Provinsi di Kabupaten atau Kota, selain itu Belanja Daerah juga menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan kewenangan daerah. Belanja Daerah memiliki komponen-komponen yang dapat mempengaruhinya diantaranya yaitu Pendapatan Daerah, Dana Bagi Hasil dan juga Jumlah Penduduk.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 14 menjelaskan bahwa Belanja Daerah merupakan seluruh kewajiban suatu daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Arti lain dari Belanja Daerah dijelaskan Sanusi & Yusuf (2018) yaitu menurut PSAP No.2, seluruh pengeluaran Rekening Kas Umum Negara atau Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam suatu periode tahun tertentu yang pembayarannya tidak akan diperoleh kembali oleh pemerintah. Mendanai urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah merupakan alasan dilaksanakannya Belanja Daerah. Jenis Belanja Daerah sendiri terdiri dari dua macam, yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung adalah penganggaran belanja yang dipengaruhi secara langsung oleh kegiatan atau program yang akan dijalankan. Sedangkan belanja tidak langsung adalah penganggaran belanja yang tidak dipengaruhi oleh pengadaan program ataupun kegiatan.

Pendapatan Daerah yang diatur dalam UU Nomor 33 tahun 2004 pasal 1 ayat 13 merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan. Pendapatan Daerah menurut Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2005 dijelaskan bahwa Pendapatan Daerah dikelompokkan atas Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan. Pendapatan Asli Daerah diperoleh ketika pemerintah daerah telah melaksanakan kegiatan seperti pelayanan yang diberikan pada publik, serta pendayagunaan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah suatu daerah. Pendapatan Asli Daerah dan kemampuan suatu daerah mempunyai kemampuan dalam mengelola keuangan suatu daerah. Dimana kemampuan mengelola keuangan daerah ini dapat berpengaruh terhadap pembangunan daerah. Beberapa sumber Pendapatan Asli Daerah yaitu semua penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan asli pada daerah tersebut, seperti hasil pajak, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Peran penting.

Pendapatan Asli Daerah pada suatu daerah yaitu dapat menentukan kinerja keuangan daerah dan kemandirian suatu daerah, sebab peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada setiap tahunnya menjadi sebuah tolak ukur dalam mengukur kemandirian suatu daerah. Semakin tinggi kontribusi dana Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD dapat membuktikan bahwa semakin sedikit ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat (Asari & Suardana, 2018). Ketika Pendapatan Asli Daerah meningkat, maka alokasi Belanja Daerah juga akan ikut meningkat. Hal ini dinyatakan oleh (Jatmiko, 2016) dalam penelitiannya yang menekankan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 18 dijelaskan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh oleh suatu daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Menurut Permendagri No. 21 Tahun 2011, Pendapatan Asli Daerah dibagi menjadi beberapa kelompok antara lain: 1) Pajak Daerah; 2) Retribusi Daerah; 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; 4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah salah satunya adalah dengan meningkatkan pendapatan masyarakat. Ketika suatu pendapatan masyarakat meningkat, maka secara otomatis Pendapatan Asli Daerah juga akan ikut meningkat. Tingginya angka Pendapatan Asli Daerah dapat menunjukkan kemandirian suatu daerah tersebut. Semakin banyak Pendapatan Asli Daerah maka kemungkinan besar suatu daerah tersebut dapat memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri tanpa bergantung dengan pemerintah pusat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2017); Liando (2017); Mooy (2019); dan Asari & Suardana (2018) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Semakin besar penerimaan daerah maka Pendapatan Asli Daerah juga semakin meningkat. Besarnya angka Belanja Daerah bergantung terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Maka dari itu diperoleh rumusan hipotesis, yaitu Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.

Dana Bagi Hasil (DBH) ialah dana yang diperoleh dari pendapatan APBN yang diberikan kepada pemerintah daerah berdasarkan angka persentase untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Perlu diketahui bahwa Dana Bagi Hasil termasuk sumber dari pendapatan yang berpengaruh serta menjadi modal dasar untuk pemerintah dalam memperoleh Dana Pembangunan dan juga memenuhi Belanja Daerah yang bukan dari Pendapatan Asli Daerah selain Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus (Liando, 2017). Akan tetapi dalam penelitian yang dilakukan oleh Sari (2017) menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja Daerah.

Dana Bagi Hasil memiliki dua komponen yang ditransfer kepada pemerintah daerah, yaitu Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak yang mencakup Sumber Daya Alam. Dimana Daerah yang mempunyai banyak kekayaan sumber daya alam dan mampu mengelolanya, maka daerah tersebut mampu membiayai daerahnya sendiri. Setelah itu hasil dari sumber daya yang dikelola tersebut akan diberikan untuk daerah-daerah dalam bentuk Dana Bagi Hasil dengan menggunakan prinsip *by origin* (daerah penghasil) dan juga melihat realisasi dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Pendapatan APBN merupakan sumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) yang dialokasikan kepada daerah yang berdasar pada angka persentase tertentu dan digunakan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Mengurangi ketimpangan fiskal vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan tujuan utama dari Dana Bagi Hasil (Sari, 290 | Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Sosial (EMBISS) Vol 1 No 4 Agustus 2021

2017). Dana Bagi Hasil dapat dikatakan sebagai sumber pendapatan daerah yang potensial dan digunakan sebagai dasar pemerintah daerah agar memperoleh dana pembangunan dan terpenuhinya belanja daerah selain dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jenis Dana Bagi Hasil yang ditransfer oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah ada dua, yaitu Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak dan dana Bagi Hasil yang bersumber dari bukan pajak yaitu Sumber Daya Alam (SDA) (Mulyati & Yusriadi, 2017). Hasil penelitian terdahulu Mulyati & Yusriadi (2017); Liando (2017); Ernayani (2017) mengenai pengaruh Dana Bagi Hasil menyatakan H0 ditolak, yang artinya Ha diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah, dimana ketika Dana Bagi Hasil mengalami peningkatan, maka Belanja Daerah juga akan meningkat. Berdasarkan penelitian tersebut, diajukan hipotesis, yaitu Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.

Selanjutnya, menurut Badan Pusat Statistika, Penduduk adalah semua orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah dalam kurun waktu 6 bulan atau seseorang yang berpindah ke suatu tempat kurang dari enam bulan tetapi berencana menetap di wilayah tersebut. Jumlah penduduk ternyata juga berpengaruh terhadap belanja daerah. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Liando (2017) yang menyatakan bahwa semakin besar jumlah penduduk maka anggaran yang dikeluarkan juga semakin besar. Banyaknya jumlah penduduk bagi pemerintah sendiri adalah salah satu faktor penting dalam pembangunan apabila penduduk daerah tersebut mampu meningkatkan kualitas serta keterampilannya juga berkontribusi dalam meningkatkan produksi nasional. Akan tetapi jumlah penduduk yang banyak dengan kualitas sumber daya manusia yang rendah akan mengakibatkan beban pembangunan dan akhirnya dapat berpengaruh terhadap struktur belanja daerah. Hal tersebut menjadi tuntutan pemerintah agar tidak berorientasi pada modal serta belanja pembangunan tetapi lebih mengalokasikan anggaran untuk membiayai urusan pelayanan social (Mooy, 2019).

Semua orang yang berdomisili di suatu wilayah dalam negara dalam kurun waktu enam bulan atau lebih dan atau selama kurang dari enam bulan dengan tujuan menetap dapat dikatakan sebagai penduduk. Adapun dalam lingkup sosiologi, penduduk dapat dikatakan sebagai populasi manusia yang menempati suatu wilayah geografi dan ruang tertentu. Komponen yang dapat mempengaruhi pertumbuhan penduduk antara lain: fertilitas (kelahiran), mortalitas (kematian), dan migrasi. Jumlah penduduk juga mempunyai peran penting dalam meningkatkan dan mengembangkan kegiatan ekonomi sebab tenaga penduduk sangat diperlukan dalam menciptakan kegiatan ekonomi. Dalam kerangka pembangunan nasional, kependudukan menjadi faktor yang sangat strategis. Maksud dari pernyataan tersebut adalah kependudukan menjadi pusat dari keseluruhan dalam pembangunan dan kebijakan yang dilakukan. Selain itu, dinamika pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah sangat berpengaruh terhadap kondisi dan keadaan kependudukan. Jumlah penduduk yang besar diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai akan menjadi pendorong bagi pertumbuhan ekonomi. Penelitian terdahulu mengenai pengaruh jumlah penduduk terhadap Belanja Daerah telah dilakukan oleh Sanusi & Yusuf (2018); Liando (2017); Mooy (2019) yang menghasilkan kesimpulan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Jadi, besaran anggaran yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh adanya peningkatan terhadap jumlah penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk, maka biaya Belanja Daerah yang dikeluarkan juga akan semakin banyak. Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat ditarik hipotesis, yaitu Jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari situs PPID Pusat berupa Laporan Realisasi Anggaran dari enam kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2016 hingga 2019. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui software EViews 9 dengan metode analisis regresi data panel. Analisis regresi data panel merupakan analisis regresi yang ditujukan untuk mengamati hubungan antara satu variabel dependen (terikat) dengan variabel independen (bebas) satu atau lebih (Sunengsih & Jaya, 2009).

Populasi dari penelitian ini yaitu seluruh kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Jawa Timur. Dimana jumlah kabupaten atau kota di Jawa Timur sebanyak 29 Kabupaten dan 9 Kota. Untuk sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *cluster Sampling*. *Cluster sampling* yaitu teknik yang digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang diteliti luas (Sugiyono, 2007). Adapun jumlah sampel yang diambil sebanyak 6 Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Timur. Sampel kabupaten atau kota yang kita ambil untuk penelitian ini yaitu Kabupaten Lamongan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Pasuruan, Kota Blitar dan Kota Mojokerto.

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini meliputi Uji Statistik Deskriptif, Uji Stasioneritas, Uji Regresi Data Panel, Uji Statistik, dan Uji Asumsi Klasik dengan taraf signifikansi 5%. Pengambilan keputusan dilakukan melalui nilai probabilitas yang dihasilkan, jika nilai probabilitas < 5% maka dapat dijelaskan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Sedangkan, jika nilai probabilitas > 5% maka dapat diartikan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dengan menggunakan EViews 9 dilakukan estimasi data Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Jumlah Penduduk (JP) terhadap Belanja Daerah (JP) di Jawa Timur Tahun 2016-2019, diperoleh hasil uji statistik yang digunakan untuk screening data sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Statistik

	Y_BD	X1_PAD	X2_DBH	X3_JP
Mean	1.76E+12	3.20E+11	1.07E+11	819645.1
Median	1.71E+12	2.13E+11	8.58E+10	829341.0
Maximum	3.24E+12	8.86E+11	2.91E+11	1616578.
Minimum	6.32E+11	1.01E+11	3.66E+10	125706.0
Std. Dev.	8.71E+11	2.13E+11	7.22E+10	527489.0
Observations	34	34	34	34

Sumber: Data diolah (2021)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa, rata-rata (mean) dari anggaran Belanja Daerah selama empat tahun di enam Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur adalah 1,76, nilai maximum 3,24, minimum 6,32, dan nilai standar deviasi pengamatan selama empat tahun sebesar 8,71.

Uji Stasioneritas merupakan metode uji pada data panel yang digunakan untuk mengetahui penggunaan data dapat bersifat flat, tidak tersisipkannya faktor trend, dan aneka konstan serta tidak ada fluktuasi periodik. Metode yang digunakan dalam uji stasioneritas adalah uji *root Levin, Lin & Chu*. Jika hasil uji menunjukkan nilai probabilitas < 0,05 maka data penelitian tersebut bersifat

stasioner. Berikut hasil uji *root Levin, Lin & Chu* Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Jumlah Penduduk (JP) terhadap Belanja Daerah:

Tabel 2. Hasil Uji Stasioneritas

No	Variabel	Prob.*	Keterangan
1	Belanja Daerah	0.0000	Data Stasioner
2	Pendapatan Asli Daerah	0.0452	Data Stasioner
3	Dana Bagi Hasil	0.0028	Data Stasioner
4	Jumlah Penduduk	0.0000	Data Stasioner

Sumber: Data diolah (2021)

Berdasarkan tabel diatas, uji *root Levin, Lin & Chu* menunjukkan bahwa data penelitian Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Jumlah Penduduk (JP), dan Belanja Daerah (BD) bersifat stasioner sebab nilai probabilitas dari ke empat variable tersebut memiliki nilai $< 0,05$.

Sebelum melakukan uji regresi linear berganda, maka harus menentukan spesifikasi model terlebih dahulu dengan menggunakan salah satu metode dari Common Effect (CEM), Fixed Effect (FEM), dan Random Effect (REM). Sedangkan untuk memilih antara ketiga metode tersebut bisa dengan menggunakan model estimasi uji *Chow*, uji *Hausman*, dan uji *Lagrange Multiplier*. Penelitian ini menggunakan model estimasi uji *Chow* dan uji *Hausman* yang memperoleh nilai *cross-section chi-square* $< 0,05$. Hal ini berarti, model yang paling tepat untuk melakukan uji regresi linear berganda yaitu dengan menggunakan metode *Fixed Effect* (FEM). Metode Fixed Effect (FEM) menyatakan bahwa, kombinasi dari data penelitian mempunyai efek tetap yang memperlihatkan objek mempunyai satu konstanta dan koefisien regresi tetap dalam bermacam-macam periode waktu. Berikut hasil dari uji *Chow* dan *Hausman*:

Tabel 3. Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	17.448582	(5,25)	0.0000
Cross-section Chi-square	51.060844	5	0.0000

Sumber: Data diolah (2021)

Uji Chow dilakukan untuk menentukan model regresi data panel yang lebih baik antara *CEM* dan *fixed effect model (FEM)*. Tingkat signifikansi (α) yang digunakan pada penelitian sebesar 0,05. Hasil pengujian didasarkan pada ketentuan jika nilai *prob.* pada *Cross-section Chi-Square* $< 0,05$ maka model yang direkomendasikan adalah *fixed effect model*. Sebaliknya, jika nilai *Prob.* pada *Cross-section Chi-Square* $> 0,05$ sehingga model yang direkomendasikan adalah *CEM*. Hasil uji *chow* yang telah dilakukan menunjukkan nilai *Prob.* pada *Cross-section Chi-Square* sebesar 0,0000 $< 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi data panel yang direkomendasikan berdasarkan uji *chow* adalah *fixed effect model*.

Tabel 4. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq.Statistic	Chi-Sq.d.f.	Prob.
Cross-section random	87.018184	3	0.0000

Sumber: Data diolah (2021)

Pengujian selanjutnya yang dilakukan adalah uji *hausman*. Pengujian ini dilakukan untuk menentukan model regresi data panel yang baik di antara *random effect model (REM)* dan *fixed effect model (FEM)*. Penentuan model regresi data panel dilakukan dengan cara melihat nilai *Prob.*

pada *Cross-section random*. Apabila hasil pengujian menunjukkan nilai *Prob.* pada *Cross-section random* $<0,05$ maka model yang terpilih adalah *fixed effect model*. Sebaliknya, jika nilai *Prob.* pada *Cross-section random* $>0,05$ maka model yang terpilih adalah *random effect model*. Dari hasil uji hausman yang telah dilakukan menunjukkan nilai *Prob.* pada *Cross-section random* sebesar $0,0000 < 0,05$. Dengan demikian model regresi data panel yang terpilih pada uji hausman adalah *fixed effect model*. Merujuk pada hasil uji diatas, dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 8,96 + 0,375 \text{ PAD} + 6,526 \text{ DBH} + 61414,05 \text{ JP} + 2,38$$

Dalam uji statistik ini terdapat dua macam pengujian yang digunakan, yaitu uji statistik F dan uji statistik T. Uji F digunakan untuk menguji secara keseluruhan apakah variabel X1, X2, dan X3 berkesinambungan terhadap variable Y, sedangkan uji T bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh suatu variabel independen secara individu dalam menjabarkan variasi variabel dependen. Ketika menggunakan EViews, pengujian ini menjadi satu dalam uji regresi linear berganda menggunakan model yang telah ditentukan. Merujuk pada hasil uji di atas, model regresi yang tepat dalam penelitian ini adalah model regresi *Fixed Effect* (FEM). Berikut hasil dari uji regresi *Fixed Effect* (FEM):

Tabel 5. Hasil Uji FEM

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	8.96E+11	2.91E+11	3.074748	0.0050
Pendapatan Asli Daerah	0.375422	0.265244	1.415383	0.1693
Dana Bagi Hasil	6.526105	1.804299	3.616976	0.0013
Jumlah Penduduk	61414.05	201852.8	0.304252	0.7635
R-squared	0.943377	Mean dependent var		1.76E+12
Adjusted R-squared	0.925258	S.D. dependent var		8.71E+11
S.E. of regression	2.38E+11	Akaike info criterion		55.45091
Sum squared resid	1.42E+24	Schwarz criterion		55.85495
Log likelihood	-933.6655	Hannan-Quinn criter.		55.58870
F-statistic	52.06457	Durbin-Watson stat		1.482062
Prob(F-statistic)	0.000000			

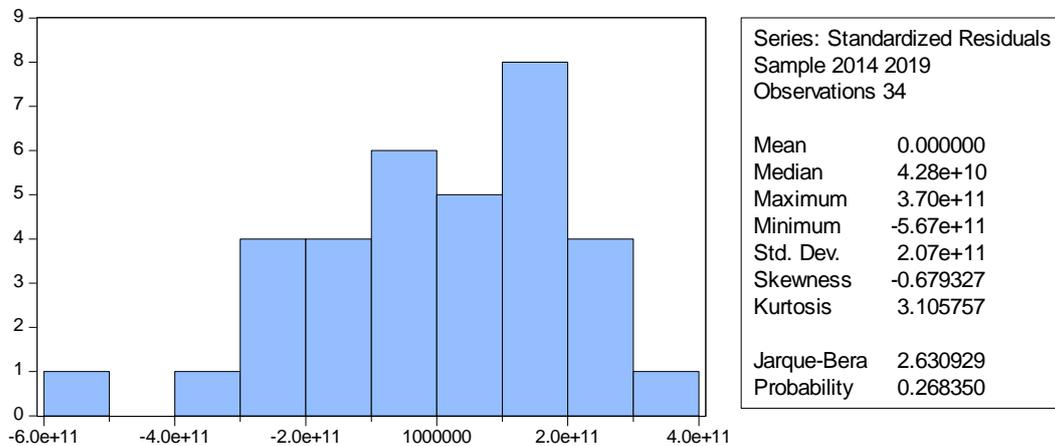
Sumber : Data diolah (2021)

Pada gambar diatas, hasil uji F dapat dilihat melalui nilai F-statistic yang menunjukkan angka $<0,05$ yang berarti seluruh data variable di atas berpengaruh signifikan terhadap Y. Sedangkan untuk uji T dapat dilihat melalui nilai probabilitas, jika bernilai $<0,05$ berarti berpengaruh signifikan terhadap Y begitupun sebaliknya. Gambar di atas menunjukkan bahwa nilai probabilitas variable X1 (PAD) 0,1693 dan variable X3 (JP) 0,7635 yang berarti H01 dan H03 diterima serta Ha1 dan Ha3 ditolak. Untuk variable X2 (DBH) menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,0013 dengan H02 ditolak dan Ha2 diterima. Dari hasil tersebut menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Jumlah Penduduk berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Daerah sedangkan untuk Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

Tujuan dari uji asumsi klasik yaitu untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik atas persamaan regresi berganda yang digunakan. Asumsi klasik terdiri dari 4 model persamaan seperti normalitas, multikolinieritas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas.

Kegunaan dari uji normalitas yaitu untuk mengetahui distribusi data dalam suatu penelitian. Cara mengetahui suatu data bisa dikatakan normal atau tidak dapat dilihat melalui normal probability plot dengan membandingkan distribusi kumulatif dan distribusi normal.

Gambar 1. Hasil Uji Normalitas



Sumber: Data diolah (2021)

Berdasarkan hasil uji diatas dapat diketahui bahwa nilai probabilitas signifikan lebih besar dari 0.05. Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil uji normalitas dalam uji data penelitian ini berdistribusi normal. Dimana nilai probability sebesar 0,268350 lebih besar dari 0.05.

Uji multikolinearitas digunakan untuk menghindari adanya kesalahan dalam proses pengambilan keputusan antara variabel independen.

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas

	X1 PAD	X2 DBH	X3 JP
Pendapatan Asli Daerah	1.000000	0.599711	0.394429
Dana Bagi Hasil	0.599711	1.000000	0.722195
Jumlah Penduduk	0.394429	0.722195	1.000000

Sumber : Data diolah (2021)

Dalam hasil uji multikolinearitas diatas menunjukkan bahwa tidak adanya korelasi yang tinggi antara variabel bebas. Dimana nilai koefisien antara variabel lebih kecil dari 0.09. Maka dapat disimpulkan bahwa uji multikolinearitas dalam penelitian ini tidak memiliki masalah multikolinearitas.

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi data observasi yang diujikan. Cara mengetahui kesalahan dalam autokorelasi satu model regresi yaitu melalui pengujian nilai *Durbin-Watson*. Berikut hasil pengujian uji autokorelasi:

Tabel 7. Hasil Uji Autokorelasi

Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.943377	Mean dependent var	1.76E+12
Adjusted R-squared	0.925258	S.D. dependent var	8.71E+11
S.E. of regression	2.38E+11	Akaike info criterion	55.45091
Sum squared resid	1.42E+24	Schwarz criterion	55.85495
Log likelihood	-933.6655	Hannan-Quinn criter.	55.58870
F-statistic	52.06457	Durbin-Watson stat	1.482062
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Data diolah (2021)

Dalam hasil uji autokorelasi diatas dapat diketahui bahwa nilai *Durbin-Watson* yaitu 1,482062 lebih besar dari 0.05. Maka dapat disimpulkan bahwa hasil uji autokorelasi pada penelitian ini tidak mengalami gejala autokorelasi.

Kegunaan dari uji heteroskedastisitas yaitu untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi perbedaan *variance residual* suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Berikut hasil uji heteroskedastisitas:

Tabel 8. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.261114	Mean dependent var	1.64E+11
Adjusted R-squared	0.024671	S.D. dependent var	1.24E+11
S.E. of regression	1.22E+11	Akaike info criterion	54.11635
Sum squared resid	3.73E+23	Schwarz criterion	54.52039
Log likelihood	-910.9779	Hannan-Quinn criter.	54.25414
F-statistic	1.104340	Durbin-Watson stat	2.633682
Prob(F-statistic)	0.393263		

Sumber: Data diolah (2021)

Dari hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat bahwa nilai probabilitas R-Squared sebesar 0.261114 dan nilai probabilitas F-Statistic Nya adalah 0.393263. Karena nilai probabilitas R-Squared dan nilai F-Statisticnya lebih besar dari 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak adanya heteroskedastisitas dalam data uji penelitian ini.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Alokasi Belanja Daerah

Dari hasil uji T diatas dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak, 0,0013 dengan nilai probabilitas t statistic 0,1693>0,05, yang artinya variabel Pendapatan Asli Daerah berhubungan positif tetapi tidak signifikan terhadap Belanja Daerah. Hal ini dikarenakan relatif kecilnya sumbangan Pendapatan Asli Daerah di masing-masing Kabupaten atau Kota Provinsi Jawa Timur. Dapat dilihat juga nilai koefisien Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah 0,375 yang menunjukkan hubungan yang lemah. Pernyataan ini didukung oleh penelitian yang dilakukan (Sasana, 2011) mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah di Kabupaten atau Kota Provinsi Jawa Barat dan penelitian oleh (Sorongan, 2013) mengenai hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Daerah di Kabupaten Minahasa Selatan yang keduanya menyatakan Pendapatan Asli Daerah tidak signifikan terhadap Belanja Daerah. Akan tetapi hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2016); Sari (2017); Fatimah et al. (2020); Ernayani (2017) yang menyatakan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Jadi ketika Pendapatan Asli Daerah meningkat, maka anggaran yang dikeluarkan untuk Belanja Daerah juga meningkat.

Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Alokasi Belanja Daerah

Dari hasil uji T yang telah dilakukan pada penelitian, dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H2 diterima dengan nilai prob. t statistic 0,0013<0,05, artinya variabel Dana Bagi Hasil berhubungan positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Apabila Dana Bagi Hasil yang diterima oleh pemerintah daerah meningkat, maka Belanja Daerah yang dianggarkan juga akan bertambah. Hal ini terjadi karena penerimaan Dana Bagi Hasil sumber daya alam dan Dana Bagi Hasil pajak cukup besar, sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang dapat direalisasikan melalui Belanja Daerah.

Hasil penelitian ini didukung oleh Ernayani (2017); Mulyati & Yusriadi (2017); Liando (2017) yang menyatakan Dana Bagi Hasil secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Akan tetapi hal ini bertentangan oleh penelitian yang dilakukan oleh Fatimah et al. (2020) mengenai pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2015 dan 2016 dengan hasil penelitian menunjukkan Dana Bagi Hasil berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Daerah. Hal ini dibuktikan oleh realisasi anggaran Belanja Daerah yang tidak sesuai dengan meningkatnya Dana Bagi Hasil.

Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Alokasi Belanja Daerah

Dari hasil uji T diatas dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_3 ditolak dengan nilai prob. t statistic $0,7635 > 0,05$, yang artinya bahwa variabel jumlah penduduk berhubungan positif dan tidak signifikan terhadap Belanja Daerah. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa meningkatnya Jumlah Penduduk tidak berpengaruh terhadap anggaran Belanja Daerah yang dikeluarkan. Hal ini terjadi karena penduduk dianggap sebagai modal pembangunan, jumlah penduduk yang besar akan berpengaruh terhadap besarnya jumlah tenaga kerja yang akan bertindak sebagai produsen maupun konsumen utama terhadap hasil produksi barang maupun jasa yang dihasilkan yang akan berkontribusi tinggi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Hasil penelitian ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Setiyawan et al. (2019) mengenai pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah di Provinsi Jawa Timur yang menyatakan bahwa Jumlah penduduk berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Belanja Daerah. Akan tetapi hal ini bertentangan oleh penelitian yang dilakukan oleh Liando (2017); Sanusi & Yusuf (2018); Sasana (2011); Mooy (2019) yang menunjukkan Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Jadi ketika Jumlah Penduduk meningkat, maka anggaran Belanja Daerah yang dikeluarkan juga akan bertambah.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah di Provinsi Jawa Timur tahun 2016 hingga 2019 dapat ditarik kesimpulan bahwa : 1) Pendapatan Asli Daerah berhubungan positif tetapi tidak signifikan terhadap Belanja Daerah; 2) Dana Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah; 3) Jumlah Penduduk tidak signifikan terhadap Belanja Daerah.

Merujuk dari hasil penelitian saran yang dapat diberikan pemerintah dapat menggali potensi yang menggali sumber Pendapatan Asli Daerah serta memaksimalkan anggarannya untuk pembangunan dan menunjang kesejahteraan masyarakat. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian dengan rentang waktu lebih dari empat tahun agar memperoleh hasil yang lebih generalisasi dan menambah faktor-faktor lain yang mempengaruhi Belanja Daerah selain Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Jumlah Penduduk.

DAFTAR PUSTAKA

- Asari, N. M. A., & Suardana, K. A. (2018). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Belanja Daerah*. 25, 877–904.
- Ernayani, R. (2017). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum , Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus pada 14 Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Timur Periode 2009-2013) Undang-Undang Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalima*. 1(1).
- Fatimah, N. N., Nopiyanti, A., & Mintoyuwono, D. (2020). Pengaruh pendaptan asli daerah dan

- dana perimbangan terhadap belanja daerah. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 21(1), 1–16.
- Jatmiko, P. E. R. (2016). Pengaruh Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 14(1), 46. <https://doi.org/10.22219/jep.v14i1.3843>
- Liando, I. I. (2017). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belanja Daerah pada Kabupaten / Kota Jawa Timur*. 6(22).
- Mooy, P. C. A. (2019). *Pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan jumlah penduduk terhadap belanja daerah*.
- Mulyati, S., & Yusriadi. (2017). *Universitas Malikussaleh*. 1(2), 211–220. <https://doi.org/10.22236/agregat>
- Sanusi, A., & Yusuf, M. (2018). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Daerah di Sumatera Utara Tahun 2013-2015 Pendekatan Panel Regression*. 3(1), 50–56.
- Sari, E. T. I. (2017). *Pengaruh PAD , DAU , DAK , dan DBH terhadap Belanja Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Timur)*. 6(22).
- Sasana, H. (2011). Analisis Determinan Belanja Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Dalam Era Otonomi Dan Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, 18(1), 46–58.
- Setiyawan, Y. P., Zuhroh, I., & Abdullah, M. F. (2019). Analisis Pengaruh Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2016. *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)*, 3(1), 2.
- Sorongon, J. F. (2013). Analisis Hubungan Dau, Pad Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3), 171–179. <https://doi.org/10.35794/emba.v1i3.1953>
- Sugiyono. (2007). *Statistika Untuk Penelitian*. Alfabeta.
- Sunengsih, N., & Jaya, I. G. N. M. (2009). Kajian analisis regresi dengan data panel. *Prodising Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan, Dan Penerapan MIPA*, 51–58.